

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amboro, Yudhi Priyo, 2020, *Hukum Kepailitan: Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Astara, Wayan Wesna, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Warmadewa University Press, Denpasar.
- Atmaja, Marhaendra Wija, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan, Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ekatjahjana, Widodo, 2022, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Farida, Maria, 2020, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Helaludin, Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Huda, Ni"matul & R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Isharyanto, 2016, *Negara Hukum dan Pengujian Konstitusional*, Cetakan I, Pustaka Hanif, Surakarta.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Ismansyah, dkk., 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Depok.
- Khaleed, Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Lubis, Fauziah, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Manhaji, Medan.
- Marpi, Yapiter, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, University Press, Mataram, 2020.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020
- Nursya A., 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*, Cetakan pertama, Alungadan Mandiri, Cambria.
- Panjaitan, Hulman, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.

- Raharjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- RedI, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Safira, Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Nata Karya, Ponorogo.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sirajudin, dkk., 2016, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shubhan, M., 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta,
- Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Qomar, Nurul, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokratis*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Warjiyati, Sri, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Yahman, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan.
- Yayasan Obor Indonesia, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD R.I 1945), Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (BW),

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), LNRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LNRI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembar Negara Tahun 2002 No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 131, TLN. NO. 4443, LL SETNEG.

## **C. Jurnal, Makalah, Artikel, Disertasi**

Arif, Siti Halilah dan Fakhrurrahman, 2021, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal*, Volume 4, Nomor 2, e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685-6077, [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id).

Atmasasmita, Romli, 2011, “Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi”, *Makalah*, 12 September 2011, dalam Muhammad Yusuf, “Merampas Aset Koruptor”, Kompas, 2013.

Easter, Lalola, dkk., 2022, *Laporan Penelitian: Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

- Fadillah, Astuti Nur, dkk., 2023, "Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti", *Jurnal Litigasi (e-Journal) Universitas Pattimura*, Volume 24, Nomor 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9827>.
- Fernando, Josua dan Susanti Adi Nugroho, "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan", *Jurnal Hukum Adigama Iniversitas Tarumanegara*, Volume 1(1):339. DOI:10.24912/adigama.v1i1.2148 2018.
- Herianto, *et.all.*, 2023, "Penyitaan Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Tobo Samosir", *Locus Journal of Academic Literature Review Universitas Sumatera Utara*, Volume 2, Nomor 6, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.189>.
- Irfani, Nurfaqih, 2020, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM*, Volume 16, Nomor 3, September 2020, 305-325, diambil dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711/pdf>.
- Krisdianto, 2015, "Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga", *Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12, Universitas Tadulako.
- Laksana, Angela Augusta, 2022, "Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana, Bagaimana Perbedaan dan Kedudukan Keduanya?", *Artikel Heylaw Edu* - 18 Juni 2022, diambil dari <https://heylaw.id/blog/sita-umum-kepailitan-dan-sita-pidana-bagaimana-perbedaan-dan-kedudukan-keduanya>
- Lala, Andi dan Tulus Rahayu, 2022, "Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol: 7 No.1 Juni 2022. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Mahardika, Muhammad Dzakir Gusti, 2020, "Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurist-Diction*, Vol. 3 (2), Volume 3 No. 2, Maret 2020. Universitas Airlangga.
- Makmur, Syafrudin, 2016, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah Universitas Ibnu Khaldun*, Volume 4 Nomor 2.

- Mega, Arizon, 2017, “Jaya, Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Volume 1 Nomor 1 , E ISSN: 2598 3105 P ISSN: 2723 2581, hlm.21, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>.
- Ngutra, Theresia, 2016, “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum”, *Jurnal Supremasi Hukum Universitas Negeri Makasar*, Volume XI Nomor 2, DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>.
- Nola, Luthvi Febryka, 2018, “Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, November 2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Noorsanti, Inggal Ayu dan Ristina Yudhanti, 2020, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Pranoto, Agus, dkk., 2018, “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Legalitas*, Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1. Universitas Batanghari.
- Reimon Simamora, 2017, “Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 8. Universitas Udayana.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus, “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi Integritas Kejaksaan Republik Indonesia*, Volume 5 Nomor e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X, DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>
- Surachman, Agus, 2017, "Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Menurut *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 7, Nomor 2, Universitas Kuningan Jawa Barat.

#### D. Internet

- Angela Augusta Laksana, 2022, “Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana, Bagaimana Perbedaan dan Kedudukan Keduanya?”, *Artikel Heylaw Edu* - 18 Juni 2022, <https://heylaw.id/blog/sita-umum-kepailitan-dan-sita-pidana-bagaimana-perbedaan-dan-kedudukan-keduanya>, diakses tanggal 21 Januari 2024.



- Faisal Javier, 2021, "ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya", 14/09/2021, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, diunduh tanggal 20 Mei 2023.
- Haris Satiadi, 2022, "Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?", 17/05/2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-aturan-besaran-harta-pailit-bagi-kreditur-konkuren-lt6283499e15a62/>, diunduh tanggal 17 Mei 2024.
- Heylaw Edu, 2022, "Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana, Bagaimana Perbedaan dan Kedudukan Keduanya?", 18/06/2022, <https://heylawedu.id/blog/sita-umum-kepailitan-dan-sita-pidana-bagaimana-perbedaan-dan-kedudukan-keduanya>, diunduh tanggal 25 Mei 2023.
- HRS, "Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit", *Berita*, 3 Mei 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit-lt51836ecd9bbf8/?page=all>, diakses tanggal 27 Januari 2024.
- Indonesia Corruption Watch, 2022, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2022", 22/11/2022, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>, diunduh tanggal 20 Mei 2023.
- Law Firm Iur Liona N. Supriatna dan Andri Marpaung & Partner's, 2020, "Ulasan Hukum Mengenai Kedudukan KUHPidana dan KUHPerdara dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", *Artikel*, (tanpa tanggal), <https://www.lawyersclubs.com/ulasan-hukum-mengenai-kedudukan-kuhpidana-dan-kuhperdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 20 Januari 2024.
- Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-undangan I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, hlm.43-45, sebagaimana dikutip oleh Fitriani Ahlan jarif, "Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia", *Artikel Hukum*, 06 Jun 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920>, diakses tanggal 31 Januari 2024.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi", 15/02/2023, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>, diunduh tanggal 21 Mei 2023.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, "Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya", 07/04/2022, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>, diunduh tanggal 15 Mei 2023.

- Rahmat Setiabudi Sokonagoro, 2024, “Asas-Asas Hukum Dalam Teori Dan Praktek”, *Artikel*, 14 April 2023, *dari* <https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26916>, diakses tanggal 19 Januari 2024.
- Soedeson Tandra, 2020, “Sita Umum Yang Di Atasnya Terdapat Sita Pidana”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/184008>, diakses tanggal 21 Januari 2024.
- Tim Hukumonline, “Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat”, *Artikel*, 24 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/?page=2>, diakses tanggal 30 Januari 2024.
- Willa Wahyuni, “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, *Artikel*, 12 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-general-lt631f21adec18c/?page=all>, diakses tanggal 19 Januari 2024.